

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Konsep Pemberdayaan Masyarakat

2.1.1.1 Pengertian Pemberdayaan

Pengertian pemberdayaan sudah banyak dikemukakan oleh para ahli, namun jika dilihat dari asal kata “daya” dengan ditambah dengan awalan “ber” mempunyai makna kata tenaga/kekuatan. Maka dari itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya agar objek menjadi berdaya (mempunyai kekuatan/keahlian). Kata pemberdayaan berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *empowerment*. Menurut Merian Webster dalam (Maryani, 2019, hlm. 1) mengartikan *empowerment* sebagai :

- a. *To give ability or enable to*, yang berarti memberi kemampuan atau cakap untuk melakukan sesuatu
- b. *To give power of authority to*, yang berarti memberi kewenangan/kekuasaan.

Karena pentingnya peran manusia dalam pembangunan, maka pemberdayaan masyarakat menjadi topik penting yang menjadi perhatian semua baik pemerintah, swasta dan masyarakat itu sendiri. Wasistiono (1998:46) dalam bukunya mengutip pernyataan Carlzon dan Macauley dalam (Maryani, 2019, hlm. 1) yang menjelaskan bahwa pemberdayaan diartikan sebagai: "membebaskan seseorang dari kendali yang kaku, dan memberi orang kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide - idenya, keputusan-keputusannya dan tindakan tindakannya."

Menurut (Afriansyah & Faried, 2023, hlm. 5) Pemberdayaan adalah kata benda, sedangkan actionnya adalah kata kerja yaitu memberdayakan. Memberdayakan masyarakat merupakan upaya untuk mengangkat harkat dan martabat lapisan masyarakat yang pada keadaan sebelumnya tidak dapat lepas dari jerat kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan adalah upaya memberikan

kekuatan (*empowerment*) atau kekuatan (*empowerment*) kepada suatu komunitas. Pemberdayaan masyarakat dapat dikatakan sebagai usaha memandirikan, mengembangkan, menswadayakan, dan memperkuat posisi tawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan melalui pengalihan pengambilan keputusan kepada masyarakat agar mereka terbiasa dan mampu.

Menurut Prijono dan Pranarka (1996) dalam (Mardikanto, dkk, 2015, hlm. 93) konsep pemberdayaan itu sendiri ialah manusia sebagai subyek dari dirinya sendiri, yaitu manusia sebagai pelaku utama atas keberhasilan pemberdayaannya. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya.

Berdasarkan pernyataan di atas maka pemberdayaan merupakan upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengentasan kemiskinan yang ada di masyarakat, pemberdayaan juga disebut sebagai proses perubahan elemen masyarakat dengan diikuti beberapa program agar mempunyai suatu keahlian untuk bisa berubah menjadi masyarakat yang mandiri, berswadaya, dan mampu bersaing dengan masyarakat modern.

Pemberdayaan menurut (Purnomo, 2020, hlm 13) mengacu pada perluasan kebebasan memilih dan kebebasan bertindak dalam membentuk kehidupan. Ini berarti mengelola sumber daya dan keputusan. Kebebasan kaum miskin sangat dibatasi oleh ketidakberdayaan mereka dalam kaitannya dengan berbagai institusi, baik formal maupun informal. Karena ketidakberdayaan berakar pada budaya hubungan kelembagaan yang tidak seimbang, maka dengan adanya kelembagaan pemberdayaan yaitu proses pemenuhan kebutuhan dengan cara lebih efisien dan berguna. Hal ini juga dipertegas oleh Narayan (2005) bahwa pemberdayaan adalah proses penguatan aset, kemampuan masyarakat miskin untuk berpartisipasi, mempengaruhi, mengontrol dan bertanggung jawab atas individu dan institusi.

Secara bahasa, pemberdayaan diambil dari kata ‘daya’ yang berarti ‘kekuatan’ atau ‘kemampuan’. Adapun pemberdayaan diartikan sebagai suatu proses menuju berdaya, atau bisa juga disebut sebagai cara untuk memperoleh daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang mempunyai daya kepada yang kurang atau belum berdaya untuk diberikan suatu keahlian. (Sulistiyani, 2004, hlm. 21) dalam (Anggainsi & Ulum, 2020).

Sejalan dengan beberapa pernyataan diatas, pemberdayaan secara umum merupakan proses pihak yang mempunyai daya untuk memberikan pengarahan kepada pihak yang diberi daya agar bisa berswadaya. Selain itu, pemberdayaan juga bukan hanya sekedar persoalan yang memberi daya dan menerima daya namun, pemberdayaan dapat dikatakan berhasil jika sama sama saling memberikan kemampuan/cakap dan mampu memberi keputusan. Pemberdayaan menekankan pada proses menstimulasi, mendorong, memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan hal yang akan merubah hidup, nasib dan lingkungan. Dalam prosesnya, capaian kemampuan, kapasitas mulai dari individu, kelompok, masyarakat dan Negara termasuk kedalam upaya pemberdayaan, karena usaha atau dorongan meningkatkan kemampuan/kompetensi dalam menyelesaikan masalah dan memenuhi kebutuhan masyarakat desa ada proses menuju keberdayaan, sehingga masyarakat sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan program pemberdayaan ini, partisipasi masyarakat perlu dan harus bisa dilakukan agar masyarakat mampu mengatasi masalah sosial di lingkungan mereka terutama masalah pengentasan kemiskinan. Pemberdayaan bisa berupa apapun yang dapat merubah masyarakat dari tertinggal menjadi maju, dari yang tidak mempunyai keahlian/kemampuan/cakap menjadi mampu dan berdaya sehingga dapat mengatasi masalah sosial tersebut dengan masyarakat tersebut sudah mandiri, berswadaya, dan cakap.

2.1.1.2 Pengertian Masyarakat

Menurut (Prasetyo, 2019, hlm. 164) secara umum pengertian masyarakat adalah sekumpulan individu-individu/ orang yang hidup bersama, masyarakat disebut dengan “*society*” artinya adalah interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan, berasal dari kata latin *socius* yang berarti (kawan). Dalam hal

ini masyarakat merupakan sekumpulan orang yang dapat berinteraksi satu dengan yang lain, dimana dengan adanya masyarakat dapat terjadi suatu interaksi sosial antara individu yang satu dengan individu lain, hal ini masyarakat disebut dengan makhluk sosial yang membutuhkan bantuan dan kerjasama dengan yang lain.

Menurut Damanik, S. E. (2019) Masyarakat adalah sejumlah manusia yang merupakan satu kesatuan golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama saling berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontiniu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Dalam beberapa kajian mengenai pembangunan komunitas, pemberdayaan masyarakat sering dimaknai sebagai upaya untuk memberikan kekuasaan agar suara mereka didengar guna memberikan kontribusi kepada perencanaan dan keputusan yang mempengaruhi komunitasnya. Unsur-unsur suatu masyarakat (a) harus ada perkumpulan manusia dan harus banyak (b) telah bertempat tinggal dalam waktu lama di suatu daerah tertentu, dengan adanya aturan serta undang-undang yang mengatur masyarakat untuk menuju kepentingan dalam mencapai tujuan bersama.

2.1.1.3 Elemen Pemberdayaan Masyarakat

Narayan (2002:18) dalam Anggani (2020) menyatakan bahwa untuk meningkatkan keberdayaan ditentukan oleh empat elemen, diantaranya :

a. Akses ke informasi

Dalam hal ini masyarakat yang memiliki informasi biasanya dapat memanfaatkan peluang, mengakses layanan, menggunakan hak-hak mereka, bernegosiasi secara efektif, dan meminta pertanggungjawaban. *Diseminasi* informasi juga tidak hanya berupa pernyataan tertulis, namun dapat juga diperoleh melalui interaksi atau diskusi, sosialisasi, berita, debat, atau berbagai media massa lainnya.

b. Inklusi dan partisipasi

Inklusi sosial adalah pengurangan hambatan kelembagaan dan peningkatan insentif untuk meningkatkan akses bagi individu dan kelompok yang *heterogen* untuk memiliki peluang demi *aktualisasi*. Inklusi sosial berarti adalah suatu usaha yang dilakukan pelaku pemberdaya dengan cara mengatasi permasalahan-

permasalahan atau kendala yang ada pada suatu lembaga perencana pemberdayaan untuk dapat meningkatkan hubungan kemasyarakatan tanpa memandang identitas ras, etnis, agama dan budaya yang beragam sehingga dapat memiliki peluang untuk memandirikan dan menswadayakan masyarakat.

c. Akuntabilitas

Akuntabilitas mengacu pada kemampuan penyedia layanan untuk dapat mempertanggungjawabkan kebijakan, program, kegiatan, dan alokasi anggaran yang mendukung pelaksanaannya. Dalam hal pemberdayaan akuntabilitas sangat penting untuk kemajuan suatu program. Karena hal itu juga merupakan suatu pertanggungjawaban dari pihak yang memberi swadaya kepada pihak penerima swadaya, dan suatu program juga harus sudah terencana dan terstruktur baik dari pelaksanaan hingga ke transparansi anggaran.

d. Kapasitas organisasi lokal

Secara umum suara tuntutan komunitas/masyarakat yang terorganisasi lebih didengarkan daripada komunitas/masyarakat yang tidak terorganisasi. Kapasitas organisasi lokal merupakan kunci bagi efektifitas pembangunan. Labonte & verack (2001) dalam Anggaini (2020) mendefinisikan pengembangan, pembangunan kapasitas sebagai ‘peningkatan kemampuan masyarakat untuk mengatasi, mendefinisikan, menilai, dan menindaklanjuti masalah yang terkait dengan anggota masyarakat’.

2.1.1.4 Manfaat Pemberdayaan

Menurut Damanik, S. E. (2019) manfaat dilakukannya pemberdayaan masyarakat desa adalah :

- a. Menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Potensi terhadap kemandirian individu yang perlu diberdayakan, yang bersumber dari proses kemandirian tiap individu yang meluas kekeluarga, kelompok serta masyarakat.
- b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan prasarana dan sasaran yang baik fisik di bidang irigasi, jalan, dan listrik. Maupun bidang sosial sekolah dan fasilitas pelayanan

kesehatan yang dapat diakses oleh masyarakat lapisan paling bawah. Terbentuknya akses pada berbagai peluang akan membuat rakyat makin berdaya, seperti tersedianya lembaga-lembaga di bidang pendanaan, pelatihan, dan pemasaran. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat ini yang paling terpenting anatara lain adalah peningkatan mutu dan perbaikan sarana pendidikan dan kesehatan, serta akses pada sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar.

- c. Memberdayakan masyarakat dengan maksud melindungi dan membela kepentingan masyarakat yang lemah di bidang sosial ekonomi. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah atau mungkin terpinggirkan dalam menghadapi yang kuat oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayan masyarakat. Melindungi dan membela harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yang lemah.

Sesuai dengan pendapat yang diatas bahwsannya pemberdayaan masyarakat ini mempunyai point tertentu untuk dapat membantu dalam penanganan permasalahan yang kerap di hadapi oleh masyarakat, yang dimana pemberdayaan masyrakat ini memberikan bantuan kepada para masyarakat untuk dapat hidup lebih mandiri ,dengan adanya pemberdayaan masyarakat ini dapat memberikan perlindungan kepada para masyarakat agar mampu hidup lebih baik. Pemberdayaan masyrakat juga kerap memberikan informasi dan juga wadah seperti suatu lembaga untuk diberikan suatu arahan agar masyarakat dapat hidup lebih mandiri dan dapat memecahkan suatu permasalahannya.

2.1.1.5 Tujuan Pemberdayaan

Menurut Mardikanto dan Poerwoko (2012:111-112) dalam (R.Abadi, 2021, hal. 40–42) menyatakan bahwa untuk mencapai suatu pemberdayaan memerlukan target sebagai berikut :

a. Perbaikan Pendidikan (*better education*)

Pemberdayaan mestinya dibuat sebagai bentuk perwujudan pendidikan yang lebih baik. Suatu renovasi dilaksanakan melewati pemberdayaan bukan hanya sebatas pembaruan materi, metode, berkaitan waktu dan tempat, juga kesinambungan penyedia dan penerima manfaat, tapi harusnya yaitu seperti apa sebuah renovasi pendidikan non formal dalam sebuah proses pemberdayaan dapat menghadirkan antusiasme dan tekad untuk selalu mempelajari tanpa memperdulikan batas waktu dan umur.

b. Perbaikan Aksesibilitas (*better accessibility*)

Seiring bertumbuh dan berkembangnya semangat belajar, diharapkan dapat memperbaiki aksesibilitas, utamanya aksesibilitas kepada sumber informasi/inovasi, sumber pembiayaan/keuangan, penyediaan produk, peralatan dan lembaga pemasaran.

c. Perbaikan Tindakan (*better action*)

Persiapan suatu perbaikan pendidikan dan aksesibilitas dengan adanya keberagaman budaya (SDM, SDA, dan sumber daya lainnya/buatan).

d. Perbaikan Kelembagaan (*better institution*)

Perbaikan suatu aktivitas/tindakan yang dikerjakan, diharapkan dapat memperbaiki kelembagaan masyarakat, terutama pengembangan jejaring kemitraan-usaha, sehingga dapat menciptakan posisi tawar (*bergaining position*) yang kuat pada masyarakat.

e. Perbaikan Usaha (*better business*)

Dengan adanya perubahan kearah yang lebih baik mengenai pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, suatu kegiatan dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan dapat memperbaiki usaha/bisnis yang dijalankan.

f. Perbaikan Pendapatan (*better income*)

Suatu perbaikan dengan lebih baik mengenai bisnis yang dijalankan, besar harapan hal tersebut bisa membenahi pendapatan yang akan diperoleh, dimana termasuk pendapatan keluarga juga masyarakatnya.

g. Perbaiki Lingkungan (*better environment*)

Perubahan mengenai perbaikan pendapatan dapat membenahi lingkungan (fisik dan sosial), sebab rusaknya suatu lingkungan seringkali disebabkan karena kemiskinan ataupun terbatasnya pendapatan.

h. Perbaiki Kehidupan (*better living*)

Tingkat pendapatan yang memadai dengan baik dan lingkungan yang sehat, dengan ini besar harapan bisa mendatangkan perubahan kearah yang baik dalam situasi kehidupan setiap keluarga serta masyarakatnya.

i. Perbaiki Masyarakat (*better community*)

Situasi kehidupan yang lebih baik dan adanya dukungan dari lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan dapat mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Selain beberapa target diatas yang telah dikemukakan oleh Mardikanto dan Poerwoko (2012:111-112) tujuan pemberdayaan menurut (Rindi, 2016, hal. 20) adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri, meliputi mandiri berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif, dengan pengerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut.

Sedangkan menurut (Suharto, dalam widiastuti, 2015:39) dalam (mujiyono, 2017, hal. 13) tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah memberdayakan individu dan kelompok orang melalui penguatan kapasitas (termasuk kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan-keterampilan) yang diperlukan untuk mengubah kualitas kehidupan komunitas mereka. Kapasitas tersebut seringkali berkaitan dengan penguatan aspek ekonomi dan politik melalui pembentukan kelompok-kelompok sosial besar yang bekerja berdasarkan agenda bersama.

2.1.1.6 Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Menurut (Suharto,1997) dalam mardikanto (2017) hlm. 171-172 terdapat strategi pemberdayaan masyarakat, bahwa mengemukakan adanya 5 (lima) P penting yang dapat dilakukan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat khususnya melalui pelatihan dan advokasi terhadap masyarakat miskin yaitu dengan Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyongkongan, dan Pemeliharaan :

- a. Pemungkinan: ialah menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat miskin berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat miskin dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat. Pemungkinan ini dapat dilakukan dengan diadakannya kegiatan observasi yang berguna untuk mengetahui potensi masyarakat dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. setelah itu baru pelaksana merancang program yang sesuai dan memberitahukannya kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi. Menurut Mardatila (2020) sosialisasi dalam arti sempit adalah proses memperkenalkan suatu program atau kegiatan kepada seseorang dan melihat bagaimana orang tersebut menentukan tindakan dan reaksinya.
- b. Penguatan: melalui memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat miskin dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkan kembang segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat miskin yang menunjang kemandirian mereka. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok lemah, sehingga mereka memiliki kekuatan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya, (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang dapat meningkatkan pendapatannya, dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan berbagai keputusan yang mempengaruhi mereka.
- c. Perlindungan: merupakan suatu perlindungan untuk masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apabila tidak

sehat) diantara yang kuat dan lemah, dan menengah terjadinya perundungan antar kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil. Menurut Tenner dan Detoro dalam Lawasi (2017) Kerjasama tim adalah sekelompok orang yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang sama dan tujuan tersebut akan lebih mudah diperoleh dengan kerjasama tim daripada dilakukan sendiri.

- d. Penyokongan: atau memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat miskin mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat miskin agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan. Basleman dan Mappa (2011 hlm 34) motivasi yaitu keadaan seseorang yang mendorongnya untuk melakukan tindakan dalam kegiatan untuk mencapai tujuannya.
- e. Pemeliharaan: artinya memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

2.1.1.7 Tahap-tahap Pemberdayaan Masyarakat

Agar suatu pemberdayaan bisa lebih efektif maka perlu dilakukan secara bertahap dan terarah sehingga dapat memenuhi targetnya. Menurut (Apriani, 2016, hal. 279- 280) dalam (R.Abadi, 2021, hal. 42–44) terdapat tiga tahapan dalam suatu metode pemberdayaan masyarakat yaitu :

- a. Penyadaran, pada tahap ini masyarakat yang akan diberdayakan diberikan “pencerahan” atau masukan berupa pembelajaran mengenai penyadaran bahwasannya mereka memiliki hak untuk mendapatkan “sesuatu” atau dengan kata lain perlu memiliki sebuah keahlian atau keterampilan baru yang akan membuat dirinya semakin berkembang dan berdaya.

- b. Penguatan kemampuan atau kapasitas, yang biasa disebut dengan “*capacity building*”, dengan kata lain mereka diberikan kemampuan atau diberikan daya dan kuasa sehingga menjadi lebih mampu dan berkembang.
- c. Pemberian daya atau *empowerment*, dengan kata lain sempit. Pada tahap ini masyarakat akan diberikan daya, kekuasaan dan peluang dengan makna sempit, karena proses pemberian daya atau kekuasaan diberikan sesuai dengan kecakapan penerima sehingga lebih mudah dicerna jika sesuai dengan batas kemampuannya.

2.1.1.8 Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Suryadiputra, et.all dalam (Rindi, 2016, hal. 18–19) prinsip-diantaranya :

- a. Prinsip kesetaraan

Kunci dari keberhasilan suatu pemberdayaan masyarakat adalah dengan tidak membeda-bedakan antara perempuan maupun laki-laki. Antara perempuan dan laki-laki harus mempunyai peran yang sama dan seimbang, sehingga mampu berkolaborasi bersama untuk meningkatkan pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain.

- b. Partisipasi

Program pemberdayaan masyarakat itu bersifat partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Sehingga dalam prosesnya peran serta partisipasi sangatlah penting baik dari pemberi swadaya atau dari penerima swadaya tersebut.

- c. Keswadayaan atau kemandirian

Prinsip keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Bahwasanya dalam pemberdayaan masyarakat itu tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan, melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit. Sehingga dengan adanya program pemberdayaan masyarakat mereka bisa mengembangkan potensi diri atau kemampuan yang mereka miliki.

d. Berkelanjutan

Suatu program pemberdayaan harus bersifat jangka panjang atau berkelanjutan, karena program pemberdayaan dirancang oleh pemberi swadaya untuk masyarakat yang diberi daya yang dapat mensejahterakan mereka sehingga perlu kelanjutan agar masyarakat yang diberi daya dikatakan mandiri dan berswadaya.

2.2.1 Konsep Badan Usaha Milik Desa

2.2.1.1 Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Dalam pasal 1 ayat 6 UU No 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Sejalan dengan pernyataan diatas, menurut (Yunanto, 2014) dalam ((Bagus, 2020, hlm. 99) menyatakan keunikan BUMDes merupakan sebuah usaha desa milik kolektif yang digerakkan oleh aksi kolektif antara pemerintah desa dan masyarakat. BUMDes sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa.

Menurut (Ridlwan, 2018, hlm. 50) dalam (Nurhidayah & Hapsari, 2022) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu cara untuk menciptakan pemerataan lapangan pekerjaan berupa usaha sekaligus dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Berdasarkan pernyataan diatas, pengertian badan usaha milik desa adalah sebuah lembaga yang keberadaannya diperuntukkan untuk membantu masyarakat desa baik dibidang ekonomi, keahlian atau lainnya seperti pemanfaatan sumber daya yang ada di desa guna meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat.

2.2.1.2 Tujuan dan Manfaat badan Usaha Milik Desa

Menurut (Hasan dan Gusnandi, 2018, hlm 1) dalam (Devi dan Arisena, 2022) tujuan utama didirikannya BUM Desa adalah menstimulasi berkembangnya perekonomian desa dan usaha kecil sector informal, meningkatkan daya cipta dan kesempatan usaha ekonomi produktif masyarakat desa hingga peningkatan pendapatan asli desa. Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI No. 4 Tahun 2015 Pasal 3, Tujuan dan Manfaat Badan Usaha Milik Desa dalam (Novanda, dkk, 2019) yaitu :

a. Meningkatkan Perekonomian Desa

Menurut Bab XIV UUD 1945 Pasal 33 menyatakan bahwa perekonomian Indonesia dibangun atas dasar usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, dengan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga BUMDes hadir di desa sebagai agent ekonomi desa yang dikembangkan dengan asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan tersebut dibangun dengan gotong-royong dan kerja sama. Cabang - cabang produksi yang akan dikembangkan oleh BUMDes akan mampu meningkatkan pendapatan dan diharapkan dapat berguna bagi masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, usaha BUMDes yang dibuka di desa memiliki fungsi untuk berguna dan menguasai hajat hidup orang banyak.

b. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa

BUMDes hadir untuk melakukan optimalisasi aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa. Asset desa yang dimaksud ialah sumber daya alam atau kekayaan ali desa. Dengan adanya BUMDes, maka aset desa tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik.

c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi desa

Sumber daya alam di desa memang luar biasa melimpah. Dengan sumber daya alam yang melimpah tersebut menjadi suatu unggulan untuk dapat menggali potensi desa. Tetapi masih terdapat komoditas unggulan desa yang belum dimanfaatkan dengan baik. Dengan kehadiran BUMDes diharapkan potensi desa

dapat terwujud untuk dijadikan objek bisnis yang memberikan manfaat ekonomi yang akan berkorelasi kepada pendapatan dan ekonomi masyarakat.

- d. Mengembangkan rencana kerja usaha antar desa dan atau dengan pihak ketiga

Melalui BUMDes, rencana kerjasama usaha antar desa dapat dibentuk. Kondisi tersebut menjadikan adanya keterkaitan antar desa dan hubungan kerjasama yang kreatif antar desa.

- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga

Terbukanya proses bisnis dan jaringan pasar tentu akan terbentuk.

- f. Membuka lapangan kerja

Keberadaan BUMDes dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Dengan adanya BUMDes maka peluang membuka lowongan kerja di desa juga akan semakin tinggi.

- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan dari berdirinya BUMDes. Pelayanan umum akan dapat dilayani di desa melalui BUMDes. BUMDes juga diharapkan untuk bisa menumbuhkan dan pemeratakan ekonomi masyarakat desa.

- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa

Seiring dengan pendapatan masyarakat yang meningkat akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

2.2.1.3 Program-program Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa

(BUMDes)

Di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Panji Boma terdapat beberapa unit usaha dalam rangka memberdayakan masyarakat desa Werasari, diantaranya :

- a. BUM Des Shop Werasari

BUM Des Shop Werasari berdiri pada tahun 2021 dengan system warung modern dan ritel yang bermitra dengan LOTTE Mart Grosir dan supplier lainnya. Selain menyediakan barang-barang pokok tetapi di BUM Des Shop juga

menyediakan suatu program BBLH (Belanja Banyak Lebih Hemat) berlaku untuk seluruh masyarakat desa Werasari. Tujuan dari adanya program BBLH itu sendiri adalah untuk meningkatkan minat masyarakat belanja namun dengan harga murah dan mempermudah akses sehingga tidak perlu jauh-jauh berbelanja. Masyarakat yang akan menjual hasil tani juga bisa melalui BUMDes Shop, hasil berupa uang tersebut bisa ditabung.

b. Bidang Jasa

Selain bidang perdagangan BUMDes Panji Boma juga menambah jenis usaha dalam bidang jasa, diantaranya :

1) PPOB (Payment Point Online Banking)

Membuka loket pembayaran, PBB, Pajak Kendaraan, PLN dan yang lainnya, dan telah bermitra dengan Bank BRI, Mandiri, BJB selain dengan pihak bank, juga bermitra dengan SAMSAT Kab. Ciamis dalam pelayanan pajak kendaraan. Program-program yang ada di BUMDes Panji Boma ini diperuntukkan hanya untuk masyarakat desa Werasari saja. Pelayanan ini dapat dilakukan masyarakat yang hendak melakukan pembayaran sehingga tidak perlu jauh dan juga bisa dikolektifkan melalui satu orang, kemudian setiap 6 bulan sekali atau pada saat rapat tahunan mereka yang melakukan transaksi pembayaran di BUMDes akan mendapatkan Cashback dari per transaksi. Dengan kata lain tidak hanya BUMDes saja yang diuntungkan, tetapi konsumen juga akan mendapat keuntungan/ sejahtera bersama dan saling menguntungkan.

2) Internet

Pada tahun 2021 layanan internet berupa wifi telah dibuka oleh BUMDes Panji Boma untuk membantu masyarakat lebih mudah mengakses internet dan bermitra dengan Koperasi Satelit Desa Indonesia (KSDI) dan sampai saat ini sudah memiliki 116 konsumen dengan harga yang relatif rendah pada kisaran Rp. 150.000/bulan. Harganya murah, agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari adanya BUMDes. Hal ini dikarenakan pada saat Pandemi berlangsung sekitar 2021, masyarakat yang bekerja dan sekolah dilakukannya pembelajaran daring dan *work from home* sedangkan di Desa Werasari untuk akses internet terlebih daerah daerah yang jolok tidak dapat mengakses internet. Oleh karena itu

BUMDes Panji Boma mendirikan layanan internet untuk memudahkan masyarakat mengakses internet.

3) Pelayanan Mobil Sosial

Pelayanan mobil sosial diperuntukkan bagi masyarakat yang mau berobat ke Rumah Sakit, Pengajian dan Kegiatan sosial lainnya.

4) Layanan Sewa Kios

Pada tahun 2022 jumlah kios BUMDes Werasari sebanyak 7 unit dan telah disewakan sebanyak 4 unit. Sewa kios ini juga hanya berlaku bagi masyarakat desa Werasari. Sehingga bagi masyarakat yang akan memulai usaha bisa memanfaatkan kios yang disewakan oleh BUMDes Panji Boma ini.

5) Layanan Konsultan untuk Legalitas Usaha

Di desa Werasari terdapat banyak sekali pelaku UMKM, dan ada beberapa yang sedang dilayani untuk kelegalitasan usahanya. Seperti pembuatan NIDP, PIRT, HALAL. Untuk sertifikasi Halal juga itu sudah bisa didapatkan atau dikerjakan melalui BUMDes Panji Boma ini. Untuk tindak lanjut dari pelaku UMKM yang mendapat legalitas usaha, BUMDes juga membantu dalam packaging dan marketing yang baik untuk diberikan edukasi/konsultasi.

6) Pelatihan Digital Marketing

Pelatihan digital marketing ini diperuntukkan bagi mereka konsumen wifi BUMDes Panji Boma sekitar 116 dan kerjasama dengan BJB.

c. Unit Pasir Boma

Pasir boma adalah wilayah pertanian BUMDes, terdapat 5 unit usaha yang ada, diantaranya :

1) Agrowisata

Bidang agrowisata ini masih dalam proses, dan baru selesai penanaman

2) Sewa lahan

Lahan seluas 23,6 hektar disewakan kepada seluruh petani binaan BUMDes Panji Boma dan Masyarakat Desa Werasari kurang lebih ada 215 untuk mengetahui kapan dan seperti apa panen yang baik dan dilakukan pelatihan/edukasi. Setiap petani mempunyai Surat Izin

Menggarap, biaya sewa per tahun nya tiap 14x14 meter (1 bata) seharga Rp. 1000,-

3) Sektor Holtikultur

Yang paling diunggulkan yaitu di kencur dan pohon durian. Saat ini sedang ada pemeliharaan 110 pohon yang sedang dalam proses pembuahan. Total ada 1100 pohon durian dari berbagai jenis dari montong, petruk, dan lainnya langsung dikelola oleh BUMDes. Pada sector holtikultur kencur, setiap petani yang mempunyai lahan di pasir boma ditanami kencur, karena kualitas kencur yang ditanam di Pasir Boma ini memang sudah terbukti bagus karena kondisi tanah yang subur dan dipanen sekitar 2 tahun sekali.

4) Panji Boma Farm

Peternakan kambing perah jenis Sapera sekitar lebih dari 50 ekor. Peternakan ini menggunakan system dikelola oleh siapa pun yang berminat dengan nanti diberlakukan bagi hasil antara BUMDes dan Peternak. Dari kambing bisa menghasilkan susu kemudian pupuk organic untuk pohon-pohon durian yang ada di Pasir Boma dan masyarakat yang mempunyai pohon singkong juga bisa menjual daun singkong untuk dijadikan pakan ternak.

5) Binaan Petani BUMDes Panji Boma

Binaan petani yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa Panji Boma dilakukan sekitar satu tahun sekali untuk sosialisasi, penguatan dan laporan bersama. Setiap satu minggu sekali dilakukan pemeliharaan pohon durian oleh pihak BUMDes dan petani di Pasir Boma.

2.3 Hasil Penelitian yang Relevan

- 2.3.1** Penelitian yang dilakukan oleh **Tyas Arma Rindi (2019)** dengan judul skripsi **“PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN DESA WISATA (Studi Kasus Desa Wonokarto, Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur)”**. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Temuan dari penelitian ini yaitu bahwa

pemberdayaan yang ada di desa wonokarto yang bergerak pada sektor pariwisata unggulan. Dengan destinasi yang ada di desa wonokarto yaitu kerajinan bambu yang dibuat oleh sekelompok paguyuban guyup rukun, event grastrak yang diadakan setiap setahun sekali di arena wonosari indah dan embung tirtayasa yang dikelola oleh kelompok sadar wisata (podarwis) wonokarto yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat sekitar. Dalam ketiga potensi tersebut sangat berperan pada pemberdayaan masyarakat dan berpotensi mengurangi pengangguran dan mengurangi kejahatan. Serta dengan adanya desa wisata membuat masyarakat sibuk dan mempunyai pekerjaan sendiri, serta melibatkan partisipasi serta dapat memberdayakan masyarakat wonokarto.

- 2.3.2** Penelitian yang dilakukan oleh **Lia Kholilatul Arifah (2019)** dengan judul skripsi **“PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) Di PEKON CIPTA WARAS KECAMATAN GEDUNG SURIAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT”**. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data data yang disusun, dijelaskan dianalisis, diinterpretasikan dan kemudian disimpulkan.
- 2.3.3** Penelitian yang dilakukan oleh **Adinda Septya K (2021)** dengan judul skripsi **“PERAN BADAN USAHAN MILIK DESA (BUMDES) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT” (Studi Kasus di Desa Pekalongan Kecamatan Winong Kabupaten Pati)**. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian tersebut adalah dapat menambah pendapatan masyarakat dengan adanya program-program yang dilakukan BUMDes seperti; bank sampah, pengelolaan sampah, dan kemitraan atau kerjasama sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang ikut bergabung dengan BUMDes Kencana Mandiri serta masyarakat dapat diperdayakan. Kedua, meningkatkan semangat wirausaha dalam aspek yang lebih luas. Ketiga, meningkatkan kreatifitas dan inovasi masyarakat dalam berwirausaha.

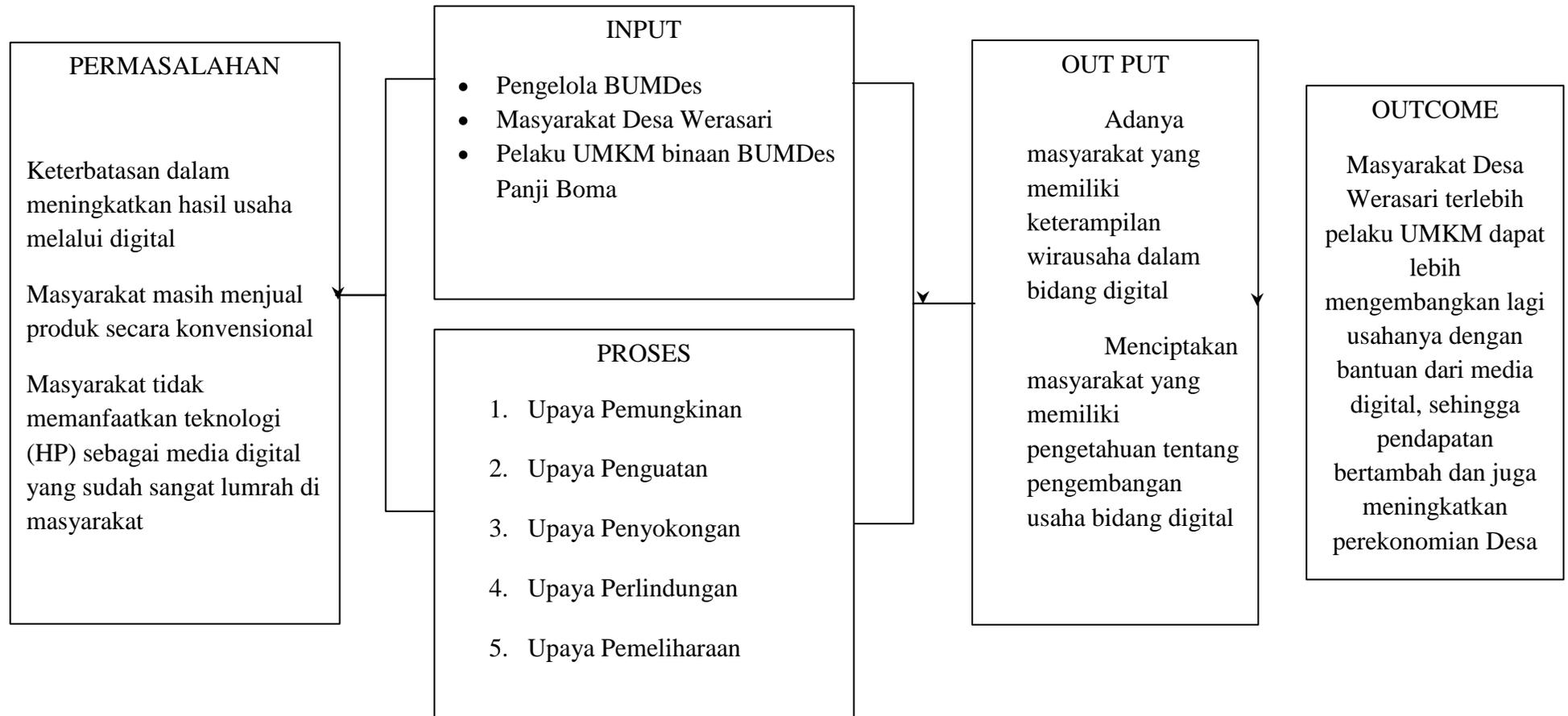
Keempat, ketergantungan masyarakat pada masyarakat lainnya mulai menghilang.

- 2.3.4** Penelitian yang dilaksanakan oleh **Ilyas dan Ita Layyinatush Shifa (2020)** dengan judul **“PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA”**. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Temuan penelitian bahwa peran perencanaan pembangunan Desa Tejakula dalam memberdayakan BUMDes Teja Kusuma, pertama bertujuan menanggulangi pengangguran, dapat berfungsi sebagai stabilisator, innovator, modernisator, pelopor dan pelaksana, secara umum dapat dikatakan sudah berjalan sebagaimana mestinya. Kedua peran BUMDes dalam pengembangan potensi masyarakat, memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan pengangguran, secara umum dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik
- 2.3.5** Penelitian yang dilakukan oleh **I Kadek Darwita dan Dewa Nyoman Redana (2018)** dengan judul **“PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENANGGULANGAN PENGANGGURAN DI DESA TEJAKULA KECAMATAN TEJAKULA KABUPATEN BULELENG”**. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Temuan penelitian bahwa peran perencanaan pembangunan Desa Tejakula dalam memberdayakan BUMDes Teja Kusuma, pertama bertujuan menanggulangi pengangguran, dapat berfungsi sebagai stabilisator, innovator, modernisator, pelopor dan pelaksana, secara umum dapat dikatakan sudah berjalan sebagaimana mestinya. Kedua peran BUMDes dalam pengembangan potensi masyarakat, memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan pengangguran, secara umum dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik

- 2.3.6** Penelitian yang dilaksanakan oleh **Niswaton Hasanah (2019)** dengan judul **“UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT DESA MELALUI STRATEGI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DESA MELIRANG KECAMATAN BUNGAH KABUPATEN GRESIK.** Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Strategi yang dilakukan oleh BUMDes pada dasarnya sudah memenuhi fokus capaian dengan berhasilnya pengembangan usaha-usaha yang ada dan pengelolaan korporasi dari BUMDes. Hal ini dapat dijelaskan bahwa fokus capaian jika dilihat dari segi bisnis, korporasi dan fungsionalnya BUMDes “eMHa” sudah memenuhinya. Akan tetapi masih ada hal yang perlu diperbaiki yaitu pada level korporasi/lembaga. Adapun Upaya Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat yang telah dilakukan oleh BUMDes “eMHa” melalui pemberdayaan masyarakat yaitu dalam bentuk menjalin kerjasama (menjadikan masyarakat sebagai mitra usaha) dalam produksi barang-barang usaha masyarakat.
- 2.3.7** Penelitian yang dilakukan oleh **Windy Putri Wiratna dan Rahma Rina Wijayanti (2023)** dengan judul **BADAN USAHA MILIK DESA DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.** Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Peranan BUMDes Binor Energy dalam mensejahterakan masyarakat desa Binor telah diwujudkan dengan adanya unit-unit usaha yang didirikan oleh BUMDesa Binor Energy. Unit usaha yang didirikan pada BUMDes Binor Energy seperti Kantin Desa, Pasar Minggu Dewi Harmoni, Cafe dan Resto Pantai Bohay. Dan yang paling berperan penting adalah unit usaha cafe dan resto Pantai Bohay, dimana karyawan dalam cafe dan restonya adalah masyarakat Desa Binor sendiri. Dalam hal ini BUMDes tersebut berkontribusi dengan membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat untuk mengurangi pengangguran.
- 2.3.8** Penelitian yang dilakukan oleh **Dika Aji Prasetyo dan Muhammad Alhada Fuadilah Habib (2023)** dengan judul **“PERAN BADAN**

USAHA MILIK DESA (BUMDESA) BENING ARTA PRIMA DALAM PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT DESA SUMBERBENING KABUPATEN TRENGGALEK". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BUMDesa Arta Prima dalam peningkatan ekonomi masyarakat Desa Sumberbening terbukti mampu meningkatkan perekonomian masyarakat desa setempat. Adapun perannya sebagai berikut diantaranya mampu menyediakan lapangan pekerjaan dengan cara mengurangi pengangguran dengan membuka lowongan kerja sebagai karyawan tetap Toko BUMDesa Bening Arta Prima, menambah pendapatan masyarakat dengan cara membuka peluang usaha dagang bagi masyarakat di sekitar Wisata Taman Bermain Waroe, membuka peluang usaha penjualan air mineral dalam kemasan melalui usaha dagang masyarakat.. BUMDesa Bening Arta Prima Juga membantu dalam mendukung kegiatan pertanian masyarakat dengan menyediakan pupuk bersubsidi bagi para petani dan membuka usaha pertanian kopi dengan menyediakan bibit kopi sengungklung dan membeli hasil panen pada kopi selain itu BUMDesa Arta Prima mampu memberikan pelayanan masyarakat dengan membantu masyarakat dalam pembayaran pajak bermontor selain itu BUMDesa Bening Arta Prima mampu membantu masyarakat dalam transaksi keuangan melalui transfer dan tarik tunai melalui BRI Link.

2.4 Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 kerangka konseptual

2.5 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan Kajian teoritis dan hasil penelitian yang relevan maka pertanyaan penelitian ini yakni bagaimana pemberdayaan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah?